

PENTINGNYA PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI DI INDONESIA¹

Oleh: Dr. Farida Hanum²

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang sedang tumbuh “menuju demokrasi”, di mana demokrasi pada awalnya adalah aspirasi politik yang ditempuh melalui suatu proses yang berpusat pada rakyat, artinya aspirasi rakyat merupakan suatu sumber inspirasi dan sekaligus merupakan penentu arah proses pengambilan keputusan publik. Sehingga masyarakat dan semua lapisan, etnis, agama, dan sebagainya merasa harus ikut dilibatkan dan diakomodir pendapat dan kepentingannya.

Indonesia adalah salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Kebenaran dari pernyataan ini dapat dilihat dari kondisi sosio-kultur maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Ada sekitar 300 suku yang menggunakan hampir 200 bahasa yang berbeda (Ainul Yakin, 2005:4). Diperkirakan bahwa pada pertengahan 1980-an, sekitar 82,2% penduduk terdiri dari 14 kelompok etnik utama dengan anggota lebih dari satu juta orang. Ada sekitar 99,4% penduduknya adalah penganut lima agama besar di dunia. Islam kurang lebih 86,9%, Protestan 6,5%, Katholik 3,15%, Hindu 1%, dan Budha 0,6% (Kamanto S., 2004).

Lebih khusus lagi, apabila dilihat dari cara pandang, tindakan, dan wawasan setiap individu yang ada terhadap berbagai macam fenomena sosial, budaya, ekonomi, politik dan terhadap hal-hal lainnya, tak dapat dipungkiri, mereka mempunyai pandangan yang beragam. Contohnya, masyarakat Indonesia dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda seperti pendidikan, etnis, agama, kelas sosial dan ekonomi, mempunyai tindakan dan pandangan yang berbeda-beda pada tentang berbagai tindakan dan pandangan yang berbeda-beda pula tentang berbagai macam fenomena sosial seperti demokrasi, hak asasi manusia, gender, dan terhadap hal lainnya. Ada anggota masyarakat yang kurang mendukung adanya proses demokratisasi di negara ini namun di sisi lain tidak sedikit yang menginginkan adanya demokratisasi. Ada anggota yang sangat peduli dan selalu memperjuangkan hak-hak asasi manusia, namun di sisi lain, tidak sedikit

¹ Disampaikan pada Seminar Nasional dengan tema “Pendidikan Multikultural dan Demokrasi di Indonesia” dan Wisuda Program Akta IV Angkatan I, STIT Alma Ata Yogyakarta.

² Dosen Sosiologi FSP FIP UNY

masyarakat yang tidak peduli dengan masalah tersebut. Bahkan dengan sengaja menggilas hak-hak asasi orang lain. Ada anggota masyarakat yang merespon baik dan bahkan mendukung adanya kesetaraan gender, namun di sisi lain tidak sedikit masyarakat yang menentangnya (Ainul Yakin, 2006).

Keragaman ini diakui atau tidak dapat menimbulkan berbagai persoalan seperti yang dihadapi bangsa Indonesia pada saat ini. Korupsi, kolusi, nepotisme, premanisme, perseturuan politik, kemiskinan, kekerasan, separatisme, perusakan lingkungan, dan hilangnya rasa kemanusiaan untuk selalu menghormati hak-hak orang lain, adalah bentuk negatif yang nyata dan sebagai bagian dari multi-kulturalisme ini.

Sedikitnya selama tiga dasawarsa, kebijakan yang sentralistis dan pengawasan yang ketat terhadap isu perbedaan telah menghilangkan kemampuan masyarakat untuk memikirkan, membicarakan, dan memecahkan persoalan yang muncul dari perbedaan secara terbuka, rasional dan damai. Kekerasan antar kelompok yang meledak secara sporadis di akhir tahun 1990-an di berbagai kawasan di Indonesia menunjukkan betapa rentannya rasa kebersamaan yang dibangun dalam negara bangsa, betapa kentalnya prasangka antar kelompok dan betapa rendahnya rasa pengertian antar kelompok. Kekuasaan komunal dan negara seakan telah menjadi ciri-ciri permanen masyarakat Indonesia. Colombijin dan Lindbald (2002: 18) menyebut Indonesia sebagai "*a violent country*". Menurut pengamatannya, "orang-orang Indonesia telah mengalami tingkat kekerasan yang mengerikan baru-baru ini". Dengan mengutip banyak sumber mereka menunjukkan banyak kasus konflik bersenjata, pemusnahan, pembunuhan, pembantaian, pemenggalan, perkosaan, intimidasi, dan perusakan properti publik dan swasta, serta fakta bahwa pada tahun 2001 ada 1,3 juta orang tidak tercatat (mungkin hilang) di Indonesia.

Pluralisme atau kemajemukan pastilah didapati pada setiap masyarakat. Teristimewa pada saat ini, ketika teknologi transportasi dan teknologi informasi telah mencapai kemajuan sangat pesat, kemajemukan merupakan *inevitable destiny* di tingkat global maupun di tingkat negara dan komunitas. Secara teknis dan teknologis kita telah mampu tinggal bersama dalam masyarakat majemuk, namun spiritual kita belum memahami arti sesungguhnya dari hidup bersama dengan orang yang memiliki perbedaan budaya yang antara lain mencakup perbedaan agama, etnisitas, dan kelas sosial (Khisbiyah, 2000).

Seperti halnya bangsa Indonesia, kemajemukan suku merupakan salah satu ciri masyarakat Indonesia yang sering dibanggakan. Banyak orang yang belum juga menyadari bahwa kemajemukan tersebut juga menyimpan potensi konflik yang dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu adalah sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai multicultural sejak awal pada anggota masyarakat Indonesia, agar mekanisme dan nilai-nilai substantif dalam demokrasi dipahami secara benar. Sebab nilai-nilai multicultural dan nilai-nilai demokrasi memuat nilai humanisme (kemanusiaan) seperti keadilan, empati, kebersamaan, dan mampu menerima perbedaan.

Berdasarkan permasalahan seperti di atas, perlu kiranya dicari strategi khusus dalam memecahkan persoalan tersebut melalui berbagai bidang sosial, politik, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Berkaitan dengan hal ini, pendidikan multikultural menawarkan salah satu alternatif melalui penerapan strategi dan konsep pendidikan yang berbasis pada pemanfaatan keragaman yang ada di masyarakat, khususnya yang ada pada siswa seperti keragaman etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, kemampuan, umur, dan ras. Pendekatan melalui pendidikan multikultural yang terpenting, strategi pendidikan tidak hanya bertujuan agar supaya siswa mudah memahami pelajaran yang dipelajarinya, akan tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran mereka agar selalu berperilaku humanis, pluralis, dan demokratis.

Pengertian Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural dapat didefinisikan sebagai “pendidikan untuk atau tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan”. Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa pendidikan jangan hanya dipandang sebagai “menara gading” yang berusaha menjauhi realitas sosial dan budaya. Pendidikan harus mampu menciptakan tatanan masyarakat yang terdidik dan berpendidikan, bukan sebuah masyarakat yang hanya mengagungkan prestise sosial sebagai akibat kekayaan dan kemakmuran yang dialaminya atau keturunan yang diwarisinya.

Istilah “pendidikan multikultural” dapat digunakan baik pada tingkat deskriptif dan normatif, yang menggambarkan isu-isu dan masalah-masalah pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat multikultural. Lebih jauh ia juga mencakup pengertian

tentang pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi pendidikan dalam masyarakat multikultural. Dalam konteks deskriptif ini, maka kurikulum pendidikan multikultural mestilah mencakup subjek-subjek seperti: toleransi; tema-tema tentang perbedaan etno-kultural dan agama; bahaya diskriminasi: penyelesaian konflik dan mediasi; HAM: demokratis dan pluralitas; kemanusiaan universal dan subjek-subjek lain yang relevan (Tilaar, 2002).

Pendidikan multikultural adalah suatu pendekatan progresif untuk melakukan transformasi pendidikan yang secara menyeluruh membongkar kekurangan, kegagalan dan praktek-praktek diskriminasi dalam proses pendidikan (Muhaemin El Ma'Hady, 2004). Sejalan dengan itu Musa Asy'arie (2004) mengemukakan bahwa pendidikan multikultural merupakan proses penanaman cara hidup menghormati, tulus dan toleran terhadap keragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Dengan pendidikan multikultural, diharapkan adanya kekenyalan dan kelenturan mental bangsa menghadapi benturan konflik sosial.

Ainul Yakin (2005) mengemukakan bahwa pendidikan multikultural adalah strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada para siswa seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial, ras, kemampuan dan umur agar proses belajar menjadi efektif dan mudah. Pendidikan multikultural sekaligus juga akan melatih dan membangun karakter siswa agar mampu bersikap demokratis, humanis, dan pluralis dalam lingkungan mereka. Artinya siswa selain diharapkan dapat dengan mudah memahami, menguasai dan mempunyai kompetensi yang baik terhadap mata pelajaran yang diajarkan guru, siswa juga diharapkan mampu untuk selalu bersikap dan menerapkan nilai-nilai demokratis, humanisme dan pluralisme di sekolah atau di luar sekolah.

Pendidikan multikultural (*multicultural education*) merupakan respon terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah, sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok. Dalam dimensi lain, pendidikan multikultural merupakan pengembangan kurikulum dalam aktivitas pendidikan untuk memasuki berbagai pandangan, sejarah, prestasi dan perhatian terhadap orang-orang dari etnis lain. Artinya secara luas pendidikan multikultural itu mencakup seluruh siswa tanpa membedakan kelompok-kelompok seperti etnis, ras, budaya, strata sosial, agama dan gender, sehingga mampu mengantarkan siswa menjadi manusia yang toleran dan menghargai perbedaan.

Selain perbedaan etnis, sebenarnya perbedaan keyakinan (agama) juga cukup rawan menyimpan potensi konflik yang dapat menghancurkan kebersamaan, persaudaraan, sarana prasarana. Di Indonesia kasus yang demikian yang terjadi di wilayah Poso yang ternyata cukup sulit untuk diselesaikan. Tidak terhitung berapa banyak air mata; nyawa; harta dan keutuhan keluarga yang dikorbankan dengan tujuan perjuangan yang tidak jelas. Kebencian yang mendalam antar sesama etnis yang kebetulan berbeda agama, telah menghilangkan rasa kebersamaan dan solidaritas daerah.

Masing-masing kelompok agama tersebut menganggap bahwa mereka dalam posisi yang benar; kerukunan umat beragama yang dipelajari melalui *textbook* di sekolah seolah-olah tidak bermakna sama sekali. Nampaknya, konflik yang disebabkan oleh perbedaan agama cukup sulit untuk ditangani, sebab faktor primordial ideologis yang telah tertanam di jiwa seseorang sulit untuk dihilangkan. Oleh karena telah mendarahdaging dan menjadi bagian dari hidup dan tingkah laku individu tersebut. Seorang individu untuk dapat memiliki sikap tenggang rasa dan menghormati perbedaan agama, maka seyogianya sejak kecil nilai-nilai tersebut ditanamkan melalui berbagai kesempatan, baik yang berupa wacana maupun tindakan-tindakan nyata. Dalam hal ini keteladanan sikap dari orangtua, guru dan orang dewasa di sekitar individu berpengaruh sangat besar.

Agama seharusnya dapat menjadi pendorong bagi umat manusia untuk menegakkan perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia di bumi ini. Sayangnya, dalam kehidupan yang nyata, agama justru menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan dan kehancuran umat manusia, contoh konkrit di Bosnia Herzegovina, di Irlandia dan sebagainya. Di Indonesia juga terjadi serangkaian kejadian pahit seperti di Poso, Ambon (1999-2002); Surabaya Situbondo dan Tasikmalaya (1996), dan sebagainya. Tidak saja korban jiwa yang sangat besar akan tetapi juga telah menghancurkan ratusan tempat ibadah (baik gereja maupun masjid) yang terbakar dan hancur.

Setelah adanya kenyataan pahit yang demikian itu, sangat perlu membangun upaya-upaya preventif agar masalah pertentangan agama tidak akan terulang lagi di masa mendatang. Memberikan pendidikan tentang pluralisme dan toleransi beragama melalui sekolah adalah beberapa upaya yang preventif yang dapat diterapkan. Berkaitan dengan hal ini maka penting bagi institusi pendidikan

dalam masyarakat yang multikultural untuk mengajarkan perdamaian dan resolusi konflik seperti yang ada dalam nilai-nilai pendidikan multikultural.

Dalam pendidikan multikultural, seorang guru atau dosen tidak hanya dituntut untuk mampu secara profesional mengajarkan mata pelajaran yang diajarkannya. Akan tetapi juga mampu menanamkan nilai-nilai keragaman yang inklusif kepada para siswa. Pada akhirnya, dengan langkah-langkah demikian, *output* yang diharapkan dari sebuah proses belajar mengajar nantinya adalah para lulusan sekolah atau universitas yang tidak hanya pandai sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuninya, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai keberagaman dalam memahami dan menghargai keberadaan para pemeluk agama dan kepercayaan yang lain.

Pemahaman tentang Demokrasi

Bonger (dalam Badruli, 2005) menjelaskan bahwa demokrasi modern secara teoritis, yaitu dalam arti formil dan demokrasi dalam arti materiil. Demokrasi secara formil hanya sekedar mengandung pengakuan bahwa faktor yang menentukan dalam negara ialah kehendak rakyat yang kemudian menjadi sebab sebagian besar dari rakyat. Persamaan dalam bidang politik yang tidak disertai dengan usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan dalam bidang ekonomi menimbulkan pemerasan dalam bidang materiil, yang akibatnya demokrasi dalam bidang politiknya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Demokrasi formil dinamakan juga demokrasi liberal.

Demokrasi secara materiil intinya justru terletak dalam jaminan yang diberikan hak-hak yang mendasar pada pengakuan kemerdekaan tiap-tiap orang yang menjadi warga negara. Jadi titik beratnya kepada usaha-usaha untuk menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedang persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan. Akibatnya demokrasi materiil akan menimbulkan pemaksaan di bidang rohaniah (spiritual), demokrasi ini dinamakan pula demokrasi Timur, yang umum dianut di negara-negara sosialis.

Bagi Indonesia yang sedang mengembangkan diri sebagai negara demokrasi, peran pendidikan semakin penting, karena untuk menumbuhkan dan mengembangkan *civic culture* membutuhkan upaya yang sistematis dan integralistik agar generasi muda dapat tumbuh berkembang dalam dunia pendidikan.

Menumbuhkan dan mengembangkan *civic culture* merupakan modal yang cukup fundamental bagi upaya mewujudkan dan menegakkan demokrasi di tengah masyarakat.

Nilai-nilai demokrasi sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan demokratis. Berdasarkan nilai atau kondisi ini maka pemerintahan demokratis dikembangkan. Nilai-nilai tersebut antara lain kebebasan (berkelompok, berpendapat, berpartisipasi), menghormati orang/kelompok lain, kesetaraan, kerjasama, persaingan, kepercayaan. Di samping nilai-nilai tersebut di atas, diperlukan pula sejumlah kondisi agar nilai-nilai tersebut dapat ditegakkan sebagai pondasi demokrasi.

Kesetaraan atau egalitarisme merupakan salah satu nilai fundamental yang diperlukan bagi pengembangan demokrasi di Indonesia. Kesetaraan diartikan sebagai kesempatan yang sama bagi setiap warga negara. Kesetaraan memberi tempat bagi setiap warga negara tanpa membedakan etnis, bahasa, daerah, maupun agama. Nilai ini diperlukan bagi masyarakat heterogen seperti Indonesia yang sangat multi etnis, multi bahasa, multi daerah dan multi agama.

Gabriel Almond (1996), dalam kajian untuk menguji hipotesis bahwa ada kaitan antara keberhasilan demokratisasi suatu bangsa dan keberadaan kultur dan struktur sosial politik yang demokratis, menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kultur demokrasi adalah kultur campuran, yaitu antara kebebasan/partisipasi di suatu pihak dan norma-norma perilaku di pihak lain.
2. Kultur demokrasi bersumber pada kultur masyarakat secara umum, yang mengandung *social trust* yang tinggi dan *civichness*, kecenderungan hubungan kerja yang bersifat horisontal/sederajat.
3. Kultur demokrasi senantiasa memerlukan dan berbasis masyarakat madani.
4. Kultur demokrasi tersebut dipegang oleh masyarakat di suatu negara sangat tergantung pada perilaku pemerintah dalam berdemokrasi (Asykuri Ibn Chamim, dkk., 2003).

Dalam mengembangkan kultur demokrasi, Almond mengatakan bahwa suatu bangsa harus melewati tiga tahap, *tahap pertama* ialah tahap pengembangan institusi yang demokratis. Tahap ini dalam batas-batas menciptakan kondisi sosial

dan personalitas individu yang mendukung terwujudnya demokrasi. *Tahap kedua* ialah merupakan suatu proses untuk mewujudkan sikap individu yang mendukung demokrasi. Pada awal reformasi, kiranya hampir sebagian besar warga bangsa bersikap prodemokrasi. *Tahap ketiga* adalah merupakan upaya mewujudkan struktur sosial dan kultur politik yang demokratis. Tahapan-tahapan ini dapat dimulai melalui institusi pendidikan, khususnya melalui pendidikan multikultural.

Tujuan utama pendidikan multikultural adalah mengubah pendekatan pengajaran dan pembelajaran ke arah memberi peluang yang sama pada setiap anak. Jadi tidak ada yang dikorbankan demi persatuan. Untuk ini kelompok-kelompok harus damai, saling memahami, mengakhiri konflik tetapi tetap menekankan pada tujuan umum untuk mencapai persatuan. Pada siswa atau mahasiswa ditanamkan pemikiran lateral, keanekaragaman dan keunikan itu dihargai. Itu berarti harus ada perubahan sikap, perilaku dan nilai-nilai khususnya bagi civitas akademika di sekolah. Ketika siswa atau mahasiswa berada diantara sesamanya yang berlatar belakang berbeda mereka harus belajar satu sama lain, berinteraksi dan berkomunikasi, sehingga dapat menerima perbedaan diantara mereka sebagai suatu yang memperkaya mereka. Gibson (dalam Hernandez, 2001) menyebutkan bahwa pendidikan multikultural adalah sebuah proses di mana individu mengembangkan cara-cara mempersepsikan, mengevaluasi berperilaku dalam sistem kebudayaan yang berbeda dari sistem kebudayaannya sendiri.

Pandangan Gibson ini mengandung makna bahwa pendidikan tidak hanya sekedar urusan sekolah atau pendidikan multikultural dengan sekedar program sekolah formal. Pandangan ini lebih luas, pendidikan sebagai sebagai transmisi budaya baik melalui pembelajaran formal maupun informal. Selain itu pandangan ini tidak lagi menyamakan kelompok kebudayaan dengan suku (etnis). Artinya tidak lagi mengkaitkan kebudayaan hanya dengan kelompok-kelompok etnik (suku) saja, namun lebih luas dari itu sebab kelompok komunitas yang tidak terdiri dari satu etnis (suku) juga memiliki kebudayaan yang khas dari hasil interaksi sesama anggota komunitasnya. Oleh sebab itu siswa atau mahasiswa sangat penting memiliki kemampuan untuk dapat hidup dalam keberagaman.

Mengimplementasikan pendidikan multikultural di sekolah tidak harus menjadi mata pelajaran khusus dan masuk pada kurikulum formal (mengubah kurikulum yang ada). Yang paling penting dapat diimplemantasikan langsung pada tindakan nyata. Senada dengan itu Sri Sultan Hamengkubuwono X (2004) juga

mengungkapkan bahwa dalam pendidikan multikultural guru ataupun dosen harus memberi contoh sikap dan keteladanan seperti yang ada pada nilai-nilai multikultural, dengan demikian para siswa dan mahasiswa akan mengikutinya. Selanjutnya beliau menambahkan kalau mau menjadi guru dan dosen yang baik, harus bisa menjadi contoh yang menghargai perbedaan, bersikap toleran, cinta damai dan saling menghargai kepada anak didiknya.

Strategi Pengembangan Pendidikan Multikultural

Menurut Hernandez (dalam Conny S., 2004) paling tidak ada 4 (empat) pendekatan yang dapat dilakukan untuk menerapkan pendidikan multikultural, yaitu: 1) pendekatan kontribusi; 2) pendekatan tambahan; 3) pendekatan transformasi; dan 4) pendekatan aksi sosial.

Pendekatan pertama dan kedua pada umumnya struktur dan tujuan dasar tetap tidak berubah. Strukturnya sama dengan kurikulum nasional dan isi mikrokultur yang diberikan terbatas pada kejadian, peringatan, dan pahlawan. Pendekatan ini hanya berupa tambahan yang dirancang untuk semua siswa atau mahasiswa, tetapi mereka tidak mendapat pandangan umum tentang peran dan kerangka pemikiran kelompok etnik dan mikrokultural. Umumnya hanya mengenalkan simbol-simbol etnik (seperti: baju, senjata, bentuk rumah, dsb). Isi itu ditambahkan pada kurikulum inti tanpa mengubah asumsi dasar dan strukturnya.

Pendekatan ketiga, yaitu transformasi mengubah asumsi dasar dan memungkinkan siswa atau mahasiswa untuk memandang konsep, isu, tema dan masalah-masalah dari perspektif mikrokultural. Adapun pendekatan keempat yaitu pendekatan transformasi dengan menambah komponen-komponen yang menghendaki siswa atau mahasiswa untuk membuat keputusan tentang permasalahan sosial tersebut, dan menindakkan dalam kehidupan sehari-hari.

Selama ini nuansa pendidikan multikultural sudah diberikan di sekolah melalui pendekatan pertama dan kedua. Dalam beberapa materi pelajaran dulu dan sekarang telah menunjukkan kepentingan untuk keanekaragaman masyarakat. Misalnya, materi-materi berisi himbauan atas toleransi antar agama. Namun informasi tentang keanekaragaman budaya terbatas pada pengetahuan tentang nama, tempat, kejadian, seperti nama kerajaan, pahlawan yang melawan Belanda, pakaian dan tari tradisional. Ini merupakan bentuk pendidikan multikultural yang

disebut oleh Derman Sparks (dalam Kamanto, 2004) sebagai "*Tourist Multiculturalisme*" dan oleh Bank (2002) sebagai "*The Contribution Approach*."

Menurut penelusuran Kamanto (2004:53) dalam kurikulum KBK tahun 2004 sudah ada mata pelajaran yang berisi pendidikan multikultural seperti pendidikan sosiologi. Garis besar materi pelajaran sosiologi bagi siswa SMA menyebutkan bahwa fungsi pendidikan sosiologi adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir, berperilaku, dan berinteraksi dalam realitas sosial dan budaya yang bermacam-macam atas dasar etika, nilai dan norma, serta tujuan praktisnya meliputi pengembangan keterampilan perilaku, sikap kritis, dan rasional siswa dalam menghadapi berbagai macam situasi sosial, kebudayaan, masyarakat dan masalah-masalah sosial yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu kecakapan sosial yang diharapkan adalah "menilai keanekaragaman sosial budaya dalam kehidupan sosial". Dalam garis besar pelajaran untuk semester pertama kelas dua SMA kata "multikultural" disebutkan secara tegas; siswa diharapkan melakukan penelitian tentang formasi masyarakat multikultural, menyajikan temuan-temuan penelitian tentang formasi masyarakat multikultural, dan menunjukkan sikap dan perilaku yang diharapkan dari anggota masyarakat multikultural.

Apa yang terdapat dalam kurikulum pendidikan sosiologi SMA di atas, walaupun hanya dalam bagian tertentu saja dari keseluruhan kurikulumnya, namun pendidikan multikultural yang ada telah melaksanakan pendekatan level ketiga dan keempat seperti yang dijelaskan di bagian awal, yaitu pada level pendekatan transformasi dan pendekatan aksi sosial. Seandainya pun pendidikan multikultural tidak masuk dalam kurikulum inti sebagai mata pelajaran tersendiri, materi-materi multikultural dapat masuk pada bagian-bagian tertentu dari materi pelajaran bidang studi-bidang studi yang ada di sekolah, itu sudah sangat membantu siswa dan mahasiswa dalam mendapat dan memahami pendidikan multikultural.

Selain itu agar pendidikan lebih multikultural, maka kurikulum, model pembelajaran, suasana sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan peran guru harus dibuat multikultural. Isi, pendekatan, dan evaluasi kurikulum harus menghargai perbedaan dan tidak diskriminatif. Isi dan bahan ajar di sekolah perlu dipilih yang sungguh menekankan pengenalan dan penghargaan terhadap budaya dan nilai lain. Misalnya, dalam semua bidang pelajaran, dimasukkan nilai dan tokoh-tokoh dari budaya lain agar siswa mengerti bahwa dalam tiap budaya, ilmu itu dikembangkan. Contoh-contoh ilmuwan dan hasil teknologi, perlu diambil dari berbagai budaya

dan latar belakang termasuk jender. Kesamaan dan perbedaan antar budaya perlu dijelaskan dan dimengerti. Siswa dibantu untuk kian mengerti nilai budaya lain, menerima, dan menghargainya. Misalnya, dalam mengajarkan makanan, pakaian, cara hidup, bukan hanya dijelaskan dari budayanya sendiri, tetapi juga yang lain.

Model pembelajaran dalam kelas pun perlu diwarnai multikultural, yaitu dengan menggunakan berbagai pendekatan berbeda-beda. Penyajian bahan, termasuk matematika, dalam memberi contoh, guru perlu memilih yang beraneka nilai. Buku-buku yang ditulis dalam pelajaran pun perlu disusun untuk menghargai budaya lain dan penghargaan jender.

Dulu banyak buku memuat contoh stereotip budaya tertentu, maka kini harus lebih menyeluruh, termasuk agar tidak bias jender. Dalam Orde Baru, sering karena ditakutkan SARA, banyak buku pelajaran tidak berani memuat simbol atau gambar yang berasal dari agama lain. alasannya agar tidak ada ketegangan. Menurut saya, di jaman demokrasi ini, dan untuk membantu siswa mengenal dan menghargai, kita tidak perlu takut mencantumkan contoh dari keyakinan dan agama lain. Dengan ditutupi, anak tidak mengerti yang lain, sehingga akan lebih sulit menghargai perbedaan itu.

Suasana sekolah amat penting dalam penanaman nilai multibudaya. Sekolah harus dibangun dengan suasana yang menunjang penghargaan budaya lain. Relasi guru, karyawan, siswa yang berbeda budaya diatur dengan baik, ada saling penghargaan. Anak dari kelompok lain tidak ditolak tetapi dihargai. Bahkan yang tidak kalah penting, terlebih di tingkat SD-SMU, dekorasi sekolah perlu diatur dengan nuansa multikultural. Meski sekolah itu di Pulau Jawa, hiasan, dan dekorasi ruang dibuat beraneka ragam budaya suku-suku yang ada di Indonesia, misalnya, sehingga mengerti nilai lain.

Kegiatan ekstrakurikuler hendaknya juga multinilai. Sikap menghargai orang yang berbeda dari budaya lain akan lebih berkembang bila siswa mempraktikan dan mengalami sendiri. Maka, model *live-in*, tinggal di tengah orang yang berbudaya lain, amat dapat membantu siswa menghargai “budaya lain”. Misalnya siswa dari Bali ikut *live-in* satu minggu di tengah orang Sunda. Bila mereka mengalami bahwa di situ diterima dengan baik, mereka akan dibantu lebih menghargai budaya Sunda.

Proyek dan kepanitiaan di sekolah baik juga diatur dengan lebih variasi dan beragam. Setiap panitia terdiri dari aneka macam siswa dari berbagai suku, ras,

agama, budaya, dan jender. Ini akan lebih menumbuhkan semangat kesatuan dalam perbedaan yang ada.

Diskusi dan debat tentang persoalan konflik di masyarakat yang diakibatkan perbedaan budaya dapat membantu siswa kian mengerti makna perbedaan. Maka, penting siswa tidak diasingkan dari persoalan masyarakat. Mereka diajak kritis mengamati apa yang terjadi di masyarakat terlebih dalam kaitan penghargaan terhadap nilai orang lain. Siswa diberi kesempatan mendalami persoalan masyarakat multibudaya. Aneka gagasan coba diterima dan dibuka, sehingga anak sadar keanekaan itu.

Belajar bahasa suku lain, amat berguna. Indonesia terdiri dari banyak pulau dan suku dengan bahasa yang berbeda. Negara kita mempunyai satu bahasa nasional, Indonesia. Dan, ini baik untuk alat komunikasi antar warga Indonesia. Namun, yang kiranya tidak boleh ditinggalkan adalah bahwa kita akan lebih dibantu menghargai orang lain, bila kita dapat mengerti bahasa mereka.

Lewat bahasanya, terutama dapat menggunakannya, orang akan mudah mengerti makna terdalam budaya orang lain. Maka, semakin mengenal bahasa suku lain, akan semakin mendorong kita untuk mengerti mereka lebih dalam dan menerima serta menghargai. Kiranya usaha menghargai budaya lain dapat juga secara edukatif menekankan pentingnya belajar bahasa suku-suku lain. Bila dorongan ini sejak awal ditekankan pada siswa, maka akan membantu mereka lebih mengerti orang dari suku lain.

Peran Guru dalam Pengembangan Pendidikan Multikultural

Peran dalam pendidikan multikultural juga amat penting. Guru harus mengatur dan mengorganisir isi, proses, situasi, dan kegiatan sekolah secara multikultural, di mana tiap siswa dari berbagai suku, jender, ras, berkesempatan untuk mengembangkan dirinya dan saling menghargai perbedaan itu.

Guru perlu menekankan *diversity* dalam pembelajaran, antara lain dengan:

1. Mendiskusikan sumbangan aneka budaya dan orang dari suku lain dalam hidup bersama sebagai bangsa;
2. Mendiskusikan bahwa semua orang dari budaya apa pun ternyata juga menggunakan hasil kerja orang lain dari budaya lain. Dalam pengelompokan

siswa di kelas maupun dalam kegiatan di luar kelas guru diharapkan memang melakukan keanekaan itu.

Penutup

Tantangan utama yang dihadapi adalah bahwa proses penyebaran dan sosialisasi kebijakan pendidikan multikultural dalam kurikulum nasional tersebut perlu melibatkan semua *stakeholder* yang relevan di tingkat makro dan mikro dalam sistem pendidikan secara menyeluruh. Karena tantangan yang dihadapi juga berkaitan dengan kurang cukupnya pemahaman, variasi yang besar dalam interpretasi arti dan penolakan karena *vested interest* dari beberapa bagian *stakeholder*, lebih-lebih pada era otonomi saat ini. Selain itu seperti yang diingatkan Tibb (2002) bahwa tantangan-tantangan yang disebabkan oleh tenaga pengajar yang kurang siap dan kurang memahami multikultural menjadi kendala utama. Selain itu materi, sumber daya, perlu bebas dari bias, seperti bias kelas sosial, gender, suku, agama, urban. Dengan demikian para pengarang sumber, materi, perlu menggunakan perspektif multikultural.

Pendidikan multikultural dapat dijalankan jika para pengajar, pimpinan, sivitas sekolah dan kampus memiliki sikap multikultural serta memiliki kemampuan dalam melaksanakan dengan tepat. Hal ini juga akan menjadi tantangan, sebab sekolah-sekolah umumnya belum dapat bebas dari stereotipe dan prasangka (*prejudice*) yang bersumber dari rasa primordialisme kesukuan, keagamaan dan kelas sosial: seperti hasil temuan dari AF. Saifuddin (2004) dalam penelitiannya di 30 sekolah di 5 propinsi di Indonesia (Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan) pada tahun 2002 mendapatkan bahwa sebagian guru yang merupakan pendatang (migran) mengkategorikan siswa penduduk asli (pribumi) sebagai siswa terbelakang atau orang gunung/kampung. Stereotipe sering diekspresikan dalam proses belajar mengajar karena menganggap anak pendatang lebih baik dari anak pribumi (asli daerah tersebut). Kebalikan pula di pulau Jawa, guru sering menganggap anak dari daerah asal (Jawa) lebih pandai dari yang pendatang.

Guru merupakan faktor penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai keberagaman yang inklusif dan moderat (seperti yang disyaratkan pendidikan multikultural) di sekolah. Guru mempunyai posisi penting dalam pendidikan multikultural karena dia merupakan salah satu target dari strategi pendidikan ini. Memiliki

keberagaman yang inklusif dan moderat, maksudnya guru memiliki pemahaman keberagaman yang humanis, dialogis-persuasif, kontekstual, substantif dan aktif sosial. Pemahaman ini berarti dapat menerima perbedaan, pendapat, dan pemahaman (termasuk agama lain yang memiliki basis ketuhanan dan kemanusiaan). Pemahaman keberagaman yang multikultural berarti menerima adanya keragaman ekspresi budaya yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan keindahan. Pemahaman yang humanis adalah mengakui pentingnya nilai-nilai kemanusiaan, dapat diimplementasikan dengan adanya kepedulian sosial, menghormati hak asasi orang lain, membangun perdamaian dan kedamaian umat manusia. Apabila guru mempunyai paradigma pemahaman keberagaman yang inklusif dan moderat, dia juga akan mampu untuk mengajarkan dan mengimplementasikan nilai-nilai keberagaman tersebut terhadap siswa di sekolah.

Guru harus mampu bersikap demokratis, artinya segala tingkah lakunya, baik sikap maupun perkataan, tidak diskriminatif (bersikap tidak adil dan menyinggung) siswa-siswa yang berbeda dengannya (mungkin agama, ras, status sosial ekonomi, dan sebagainya). Guru mampu memiliki kepedulian tertentu terhadap suatu kejadian (bersikap empati) walaupun itu terjadi pada orang-orang yang berbeda ras, agama, status sosial, dan sebagainya. Gurupun harus menerapkan prinsip-prinsip keadilan tanpa memandang latar belakang budaya siswa. Siapapun dia, dari manapun asalnya, diperlakukan sama sebagai siswa yang memiliki harkat martabat sebagai manusia.

Daftar Pustaka

- Ahmad Fedyani Saifuddin, 2004. "Multicultural Education: Putting School First, A Lesson from Education Autonomy Policy Implementation in Indonesia" dalam Kamanto, dkk. (2004) *Multicultural Education in Indonesia and Southeast Asia: Stepping into the unfamiliar*. Depok-UI: Antropologi Indonesia.
- Ainul Yakin, M. 2005. *Pendidikan Multikultural, Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Bank J.A., 2002. *An Introduction to Multicultural Education*. Boston: Allyn and Bacon
- Bennett, C.I. 1999. *Comprehensive Multicultural Education*. Boston-London-toronto-Sydney-Tokyo-Singapore: Allyn and Bacon

- Colombijn F. and J. T. Lindbald, 2002. "Introduction", in Colombijn and Lindbald (eds) *Roots of Violence in Indonesia*"; Contemporary Violence in Historical Perspective. Leiden: KITLV Press
- Conny Semiawan, 2004. The Challenge of Multicultural Education in a Pluralistic Society The Indonesian Case dalam Kamanto, dkk. (2004) *Multicultural Education in Indonesia and Southeast Asia: Stepping into the unfamiliar*. Depok: UI.
- Farida Hanum. 2005. *Fenomena Pendidikan Multikultural pada Mahasiswa Aktifis FIP*. Penelitian Mandiri, FIP UNY.
- 2006-2007. *Pengembangan Model dan Modul Pendidikan Multikultural di SD (Sebagai Suplemen Mata Pelajaran IPS)*. Hibah Bersaing Lemlit UNY.
- Fuad Hasan, 2003. Pemahaman Budaya Cegah Konflik 1-3.
www.sinarharapan.co.id
- Hamengkubuwono, Sultan X, 2004. Multikultural itu Kekuatan Budaya 1.
www.bernas.co.id
- Hernandez, 2001. *Multicultural Education. A Teacher's Guide to Linking Context, Process, and Content (2nd ed)*. New York, Culombia, Ohio, USA: Merrill Prentice Hall.
- Kamanto, dkk. 2004. *Multicultural Education in Indonesia and Southeast Asia: Stepping into the unfamiliar*, Antropologi Indonesia, Depok UI.
- Khisbiyah, Yayah. 2000. *Mencari Pendidikan Yang Menghargai Pluralisme dalam Masa Depan Anak-Anak Kita*. Yogyakarta: Kanisius.
- Muhaemin El Ma'hady, 2004. Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural (sebuah Kajian Awal) 1 – 6 . <http://pendidikan.network>
- Musa Asy'arie, 2004. *Pendidikan Multikultural dan Konflik Bangsa 1-2*.
www.kompas.co.id
- Tibb, S. 2002. The Importance of Teaching Multiculturalisme in Elementary Class Rooms. Central Oregon Community College. www.cocc.edu/sdonohue/student%20writing/shanon.tibbs.htm
- Tilaar HAR, 2002. *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif Untuk Indonesia*. Jakarta: Grasindo